

PERUBAHAN KEBIJAKAN INDONESIA PADA KEANGGOTAAN ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC) TAHUN 2015-2016

Ariska Ayu Anggita

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

E-Mail: ariskaayu71@gmail.com

Indonesia pertama kali bergabung menjadi full member OPEC pada tahun 1962. Sebagai negara eksportir minyak saat itu, Indonesia berkeinginan dekat dengan negara-negara lain untuk mengurugi monopoli dari seven sisters dan menjaga stabilitas harga. Indonesia sempat dua kali mencapai puncak tertinggi produksi minyaknya, namun tidak lama setelah itu produksi minyak Indonesia terus menurun. Hingga pada tahun 2004 Indonesia bertatus sebagai net oil importir, kondisi ini berpengaruh pada keanggotaan di OPEC. Pada tahun 2008 Indonesia resmi memutuskan keluar dari OPEC, karena pemerintah menilai negara sedang berstatus importir dan mungkin akan kembali jika kondisi produksi sudah bisa memenuhi kebutuhan domestik dan kembali dapat menjadi eksportir minyak. Namun, pada tahun 2015 kondisi produksi Indonesia sedang berada pada titik terendah, justru pada tahun tersebut Indonesia memutuskan untuk kembali bergabung menjadi full member OPEC. Hingga resmi diterima pada sebagai anggota, namun pada tahun 2016 Indonesia kembali membuat kebijakan untuk keluar lagi dari keanggotaan tersebut. Untuk melihat perubahan kebijakan keanggotaan Indonesia pada OPEC dianalisis melalui Level of Analysis yang secara spesifik menggunakan model yang ditawarkan Gustavsson. Melihat perubahan luar negeri dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional, yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan. Melihat dinamika keanggotaan Indonesia di OPEC, Indonesia kembali menjadi full member tahun 2015 memiliki kepentingan untuk menambah ketahanan energi domestik. Adanya kondisi minyak dunia yang melimpah ada tahun 2014, dan kondisi domestik yang berada di titik produksi terendah membentuk persepsi pemerintah Indonesia dalam memperoleh ketahanan energi dengan dekat dari negara-negara eksportir di dalamnya. Kemudian kebijakan Indonesia keluar karena adanya ancaman baru bagi ketahanan energi yang disebabkan adanya kebijakan baru OPEC untuk melakukan pemotongan produksi bagi negara-negara anggotanya, dan adanya pertimbangan cost and benefit yang diperoleh.

Kata Kunci: OPEC, Indonesia, Importir, Ketahanan Energi, Full Member

Pendahuluan

OPEC merupakan organisasi multilateral yang menjadi tempat berkumpulnya dari negara-negara pengekspor minyak. Dibentuk pada September 1960 Konferensi Baghdad yang bertujuan untuk menegosiasikan mengenai masalah produksi, menjaga stabilitas harga minyak di pasar global, menyatukan kebijakan negara anggotanya. Menjamin pasokan minyak untuk konsumen secara efisien ekonomis dan menjaga agar investasi minyak tetap stabil (opec.org, 2012). Indonesia pertama kali bergabung dengan OPEC pada tahun 1962, sebagai salah satu eksportir minyak saat itu, Indonesia ingin menjaga stabilitas perdagangan minyak di dunia internasional. Saat itu minyak banyak dikuasai oleh perusahaan internasional yang dikenal dengan *seven sisters*. Perusahaan ini banyak memonopoli minyak, dan banyak merugikan *house countries* yang ditempatinya. Indonesia bergabung dengan OPEC agar dapat mengurangi hegemoni perusahaan tersebut yang bekerjasama dengan organisasi ini yang anggotanya merupakan negara-negara pengekspor besar lainnya. Dalam keanggotaan OPEC, digunakan sebagai wadah untuk mengkoordinasikan kebijakan guna menjamin keberlangsungan pasar yang menguntungkan bagi produsen serta dapat menjamin kebutuhan negara eksportir .

Sebagai negara eksportir Indonesia saat itu sempat mencapai puncak produksi minyak pada tahun 1977 dan 1995 dengan hasil 1,6 juta barrel per hari, (opec.org, 2012). Akan tetapi, produksi minyak di Indonesia mengalami penurunan, hingga pada tahun 2004 menyandang sebagai negara pengimpor minyak, atau resmi menjadi *net oil importir*. Kondisi ini membuat pemerintah mengkaji keanggotaannya di OPEC. Presiden membentuk rapat kabinet untuk, hingga terdapat putusan keluar dari keanggotaan OPEC disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Mei 2008. Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan OPEC akibat negara menjadi importir. Pemerintah menilai karena kondisi ini Indonesia tidak cocok menjadi anggota, karena akan memiliki perbedaan kepentingan. Namun, pemerintah menambahkan, Indonesia mungkin akan kembali mengaktifkan keanggotaannya ketika kondisi produksi sudah kembali membaik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan domestik dan dapat menjadi eksportir minyak lagi (nasional.kompas.com, 2008).

Setelah lama keluar dari keanggotaan OPEC, produksi minyak Indonesia semakin menurun, hingga pada tahun 2015 menjadi titik terendah. Namun, pada pertengahan tahun tersebut yang menjadi titik terendah produksi ini, pemerintah membicarakan untuk kembali mengaktifkan keanggotaannya. Pada akhir tahun 2015 Indonesia mengirimkan surat

penngajuan untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya. Pada Januari 2016 ketika sidang ke-168 Indonesia diputuskan secara resmi kembali menjadi *full member* oleh OPEC. Kembalinya menjadi anggota mewajibkan negara membayar iuran sebesar 2 juta USD setiap satu tahun (bappenas.go, 2015).

Tidak berselang lama setelah Indonesia kembali menjadi *full member* di OPEC. Pada 30 November 2016, tepat pada sidang ke-171 Indonesia kembali membuat keputusan untuk keluar lagi dari keanggotaan OPEC. Kondisi minyak dunia saat itu sedang melimpah hingga OPEC membuat kebijakan untuk melakukan pemotongan produksi bagi seluruh negara anggotanya. Kebijakan ini bertujuan untuk menstabilkan harga minyak pada kisaran 70-90 juta USD per barrel. Setelah kebijakan ini diputuskan Indonesia memilih keluar dari anggota OPEC pada tahun 2016 hingga saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilihat ada hal yang menarik dari bergabungnya kembali Indonesia menjadi anggota OPEC setelah lama keluar. Kebijakan Indonesia bergabung menjadi *full member* justru disaat kondisi produksi minyak berada di titik terendah. Namun setelah aktif menjadi anggota Indonesia memutuskan keluar kembali. Dari perubahan kebijakan Indonesia pada keanggotaan di OPEC ini membentuk dinamika, yang menjadi menarik untuk diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan yang di ambil pemerintah tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Keanggotaan OPEC

Indonesia menjadi salah satu negara yang sudah banyak berpengaruh selama awal keanggotaan hingga sebelum memutuskan pertama kali keluar pada tahun 2008. Perubahan kebijakan Indonesia pada keanggotaan ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu pada kondisi internasional dan kondisi domestik, sehingga akan membentuk persepsi pemerintah atau *desicion makers* dari kondisi tersebut. Nantinya persepsi yang akan menjadi tujuan Indonesia dalam keanggotaan OPEC. Melihat kondisi domestik saat itu yaitu negara berada pada titik terendah produksi, hal ini dipengaruhi beberapa faktor. Indonesia merupakan negara berkembang yang banyak bertumpu pada industri untuk meningkatkan perekonomian negara yang masih banyak menggunakan energi fosil tidak terbarukan untuk menjalankan di berbagai sektor masyarakat. Untuk menjalankan mesin di sektor Industri Indonesia masih banyak menggunakan energi minyak. Selain di sektor industri

penggunaan minyak dan gas di tempat oleh sektor rumah tangga. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan energi terbarukan masih sangat rendah. Kondisi ini mengakibatkan terus meningkatnya permintaan energi. Namun, di lain sisi kondisi Indonesia semakin terpuruk dikarenakan jumlah produksi yang terus menurun. Ketahanan energi Indonesia yang memburuk dapat dilihat melalui indikator 4-A yang dilihat dalam level negara yaitu, *availability*, *accessibility*, *affordability* dan *acceptability* (Nugroho, 2014). Walaupun negara sempat menjadi negara pengekspor namun peningkatan konsumsi yang terus mengalami peningkatan berakibat pada tahun 2004 yang menjadikan Indonesia sebagai *net oil importir*, hal ini tentunya berakibat serius pada perekonomian negara dan ketahanan energi nasional (bin.go, 2014). Melihat kondisi sebagai *net oil importir* tentunya banyak tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai indikator ketahanan energi. Ketahanan energi yang menjadi tantangan dari segi *availability* yaitu jumlah produksi minyak dan gas bumi yang semakin menurun, berbanding terbalik dengan permintaan yang justru semakin meningkat. Indonesia pernah mencapai puncak produksi minyak hingga mencapai 1,7 juta barrel per hari, namun saat ini produksi minyak rata-rata hanya mencapai 1 juta barrel per hari (Nugroho, 2014). Penurunan produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, lapangan pengeboran yang sudah tua, teknologi yang digunakan *enhanced oil recovery* yang masih terbatas, dari sektor sumber daya manusia sendiri masih kurang yang mumpuni, sehingga posisi penting perusahaan banyak yang diduduki oleh warga asing. Selain minyak bumi, kondisi keamanan energi gas di Indonesia juga menurun, dari tahun 2010 mencapai 1.582 setara barrel minyak. Kondisi produksi pada tahun 2013 hanya mencapai 1.441 ribu setara barrel per hari (Nugroho, 2014). Selain tantangan produksi yang menurun, cadangan energi minyak yang dimiliki Indonesia sangat terbatas. Indonesia belum memiliki cadangan strategis. Bahkan belum memiliki cadangan minyak yang cukup jika terjadi krisis atau kelangkaan energi. Kapasitas penyimpanan saat ini hanyalah sekitar 7,7 juta KL untuk BBM dan 430 ribu ton-metrik LPG (Nugroho, 2014). Selanjutnya tantangan dari segi *accessibility* dapat dilihat dari kemudahan untuk mendapatkan minyak masih belum merata. *Acceptability* dikaitkan dengan mutu dari minyak yang didapat. Banyak masyarakat menilai bahwa kualitas yang didapat belum maksimal. *Affordability* harga yang terjangkau yang dapat diperoleh negara yang berasal dari importir minyak, dan masyarakat. Saat ini harga BBM sebenarnya masih tinggi di kalangan masyarakat, sehingga pemerintah memberikan subsidi agar lebih terjangkau. Data APBN menyebutkan subsidi BBM yang diberikan pada tahun 2014 telah mencapai Rp. 246,5 Triliun (Nugroho, 2014). Berdasarkan permasalahan umum yang ada

kondisi produksi yang rendah berakibat pada permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan memang kurangnya investasi di sektor migas guna menunjang teknologi dalam pengolahan.

Tidak hanya faktor domestik, kondisi minyak internasional saat itu, pada tahun 2014 kondisi minyak dunia mengalami kemerosotan harga, yang sebabkan melimpahnya minyak pada saat ini. Permasalahan ini bermula dari keinginan Amerika Serikat yang meminta OPEC untuk menurunkan harga minyak, namun tidak disepakati. Amerika Serikat sendiri juga termasuk produsen minyak yang besar. Akibat adanya revolusi energi di Amerika Utara, seperti Amerika, Kanada dan Meksiko yang gencar memproduksi minyak, sehingga jumlah minyak dunia meningkat. Negara tersebut tidak menjadi anggota OPEC sehingga berusaha menjaga stabilitas harga, karena disamping produsen mereka juga merupakan negara konsumen minyak yang tinggi, sebab banyaknya industri yang menjadi pendapatan negara.

Disisi lain, untuk menjaga ekspor negara anggotanya OPEC berusaha menekan dan mempertahankan jumlah volume produksi hingga pada bulan November 2016. Akibatnya stok minyak pasar dunia pun melimpah yang berimbas pada penurunan harga jual nya. Selain itu, permintaan minyak mentah mengalami penurunan, negara besar yang mengkonsumsi minyak seperti China mengalami perlambatan ekonomi, yang berakibat pada penurunan permintaan minyak (Finance.detik, 2014).

Kepentingan Indonesia dalam Kenggotaan OPEC tahun 2015

Berdasarkan tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam ketahanan energi menekan pemerintah untuk mencari alternatif dalam penangan permasalahan ini. Melihat kondisi pada tahun 2015 yang menjadi titik terendah produksi minyak Indonesia membuat pemerintah Joko Widodo harus segera mencari sumber impor dari berbagai negara untuk menjamin ketahanan energi. Momentum pada tahun 2015 yaitu Indonesia berada pada titik terendah produksi minyak dari tahun 2006 hingga 2016. Kepentingan nasional pada saat itu adalah untuk menjamin ketahanan energi negara. Kepentingan nasional inilah yang nantinya menjadi salah satu alasan negara dalam membuat kebijakan. Kembali lagi pada ketahanan energi yang ingin dicapai, negara telah memiliki indikator untuk melihat bahwa kondisi tersebut telah terpenuhi. Merujuk pada indikator yang dibuat oleh Badan Perancangan Pembangunan

Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS). Ada 4-A yang harus dicapai Indonesia pada kondisi yang sedang mengalami defisit produksi minyak ini. Indikator tersebut terdiri dari *availability*, *accessibility*, *affordability* dan *acceptability* (bappenas.go). Tentunya Indonesia harus mencari negara yang memiliki produksi minyak yang tinggi agar dapat menimpornya dari negara tersebut. Pemerintah melihat bahwa terdapat organisasi tempat berkumpulnya negara-negara pengespor yaitu OPEC. Merespon kondisi ini pemerintah melihat peluang untuk bekerjasama dengan negara OPEC.

Indonesia pertama kali gabung dengan OPEC pada tahun 1962. Pada tahun tersebut kondisi minyak di Indonesia masih melimpah, ketahanan energi Indonesia masih terjamin. Pada saat pertamakali bergabung dengan OPEC kepentingan Indonesia adalah untuk menghindari monopoli minyak dari perusahaan multinasional yang dikenakan dengan *seven sisters*. Indonesia memiliki kondisi minyak yang simetris dengan anggota lainnya yaitu sebagai pengekspor minyak. Simetrisnya keanggotaan ini juga terlihat dari kepentingan negara pada saat itu, yaitu berkoordinasi untuk menjaga kestabilan harga minyak global agar tidak terjadi fluktuasi. Citra Indonesia di OPEC melihat sejarah dalam dinamika keanggotaan di OPEC. Peranan Indonesia dengan menjabat dalam posisi posisi penting mampu membawa agenda dalam sidang OPEC. Dengan menepati posisi-posisi penting banyak keuntungan yang didapat oleh Indonesia, seperti nilai tawar, memiliki peranan dalam membuat kebijakan.

Pada November 2015 Indonesia mengajukan permohonan untuk bergabung dalam organisasi ini. Pada Januari 2016 dalam sidang OPEC ke-168 Indonesia resmi disetujui oleh peserta sidang untuk bergabung kembali dalam keanggotaan. Walaupun pada dasarnya kepentingan negara-negara pengekspor secara sederhana tentunya berbeda dengan negara Indonesia yang berstatus sebagai pengimpor. Namun, kondisi asimetris ini dilihat tujuan yang berbeda negara-negara pengekspor di OPEC menginginkan harga yang stabil agar bisa mengesportkan minyaknya, sedangkan Indonesia sebagai negara pengimpor berkepentingan

untuk mendapatkan pasokan minyak dari negara-negara eksportir didalamnya. Pemerintah menilai dengan berkumpul dengan negara pengekspor akan lebih mudah menjadi pasokan energi untuk impor dengan banyak negara pengekspor yang membutuhkan pasar untuk menjual minyaknya. Tidak hanya itu, keputusan ini diharapkan akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Beberapa pernyataan mengenai tujuan Indonesia bergabung dengan OPEC disampaikan oleh beberapa aktor pembuat kebijakan.

Presiden selaku aktor tertinggi dalam penetapan kebijakan luar negeri, dalam keputusan ini Presiden Joko Widodo menyatakan alasan Indonesia masuk karena:

“Dulu kita pernah menjadi anggota OPEC dan tidak menjadi anggota OPEC. Kemudian kita masuk lagi karena kita ingin informasi naik turunnya harga, kemudian kondisi stok di setiap negara. Itu bisa tahu kalau menjadi anggota” (Kompas.com,2016).

Berdasarkan pernyataan diatas Jokowi berharap mendapatkan akses informasi kondisi naik turunnya harga, hal ini bermanfaat untuk mengkaji atau memprediksi kemungkinan yang akan terjadi, sehingga negara dapat mempersiapkan kebijakan yang sesuai dari informasi yang didapat. Tentu dalam membuat kebijakan akan berjalan dengan baik jika didukung oleh menteri dan birokrat yang menjabat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga menyatakan harapan kembalinya Indonesia dalam *full members* OPEC, yang menyatakan.

“Tadi kita sampaikan pada presiden, nomor satu tentunya kita ada dalam satu komunitas yang sangat punya peran dalam pasokan energi internasional terutama migas, dan berada di tengah-tengah mereka, punya jaringan, punya hubungan baik itu akan membuat kita punya akses kepada pemikiran-pemikiran ke depan sehingga bisa kita jadikan sebagai dasar untuk menata strategi dan *policy* energi kita. Karena kan ini kesempatan baik untuk terus berinteraksi, bergaul dengan mereka, menjalin jaringan dengan mereka, karena suasana harga minyak kan sedang begini, jadi bagus untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi Indonesia. Diharapkan bisa meningkatkan kepastian pasokan migas bagi kebutuhan dalam negeri”

Sumber: (youtube: I News), (Oke.finance,2015), (Liputan6).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan menteri ESDM dapat dipahami bahwa tujuan Indonesia bergabung kembali adalah untuk mendapatkan pasokan minyak dari negara pengekspor.

Selain itu, OPEC sebagai salah satu organisasi minyak yang besar tentunya kebijakan yang diputuskan akan memberikan dampak yang besar, dalam hal ini dengan bergabung Indonesia dapat memainkan peran dalam perminyakan internasional. Hal ini di perkuat pernyataan mengenai alasan Indonesia bergabung dengan OPEC di sampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wiratmadja Puja:

“Dengan bergaul ke dalam OPEC dan berteman baik di sana, kita targetnya mendapatkan *long term supply* dengan harga yang tentunya harga pertemanan juga. Arahnya juga ke sana” (Kompas.com,2015).

Selain dari pernyataan Sudirman Said selaku Menteri ESDM dan Direktur Jendral Migas. Pernyataan lain di sampaikan oleh Widyawan Prawiraatmajda selaku gubernur OPEC, yaitu perwakilan Indonesia dalam organisasi tersebut selama masa periode dua tahun.

“Dengan menjadi anggota OPEC, Indonesia sebagai negara, akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan dan bukan penerima akibat dari keputusan tersebut. Selain itu, Indonesia juga mampu meningkatkan jejaring energi internasional, percepatan alih dalam teknologi, bisnis pasokan minyak dan produk yang saling menguntungkan”. Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan kebutuhan energi yang cukup tinggi. Bergabungnya kita kembali ke OPEC merupakan bagian dari upaya kita menjamin kecukupan energi nasional. Kecukupan energi ini juga bagian dari membangun ketahanan energi, yang harus diikuti dengan pengembangan energi baru terbarukan secara sungguh-sungguh. Komitmen kita untuk mencapai 25 persen penggunaan energi terbarukan dari seluruh kebutuhan energi harus dicapai di tahun 2025. Sekarang sedang disiapkan tim untuk memanfaatkan sebesar-besarnya keanggotaan OPEC. Ada banyak manfaatnya. Kita bisa akses data yang mereka punya dan dapat analisa yang mereka buat”

Sumber: (Liputan6, 2015), (Youtube: Beritasatu, 2015).

Penjelasan lebih luas mengenai tujuan Indonesia disampaikan langsung oleh aktor yang akan memainkan peran di setiap sidang OPEC yang nantinya akan dilaksanakan, yang akan membawa kepentingan negara dalam organisasi tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pengaktifan keanggotaan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan harapan yang sama seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan

pasokan minyak, yang mana ketersediaan minyak merupakan bagian dari membangun ketahanan energi. Indonesia ingin mendapatkan percepatan teknologi, tentunya dengan adanya investor yang masuk. Jika melihat kebelakang Indonesia memiliki peranan diberbagai jabatan penting di OPEC, kali ini Indonesia juga berhadapan dapat menjadi bagian dari pengambilan keputusan, sehingga tidak hanya menerima dampak dari kebijakan organisasi tersebut. Hal ini juga di tambahkan oleh pernyataan Tenaga Ahli Tim Harga Minyak Mentah ESDM Maizar Rahman:

“Penting memaksimalkan manfaat OPEC untuk kepentingan Indonesia dan juga memaksimalkan peran Indonesia di forum OPEC. Saya kira forum OPEC dapat dimanfaatkan untuk melancarkan diplomasi ekonomi dengan memperkuat posisi tawarnya dalam pengadaan minyak,” (Republika.co, 2015).

Dewan Perwakilan Rakyat juga menyatakan kesepakatan langkah pemerintah untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya, sebab melihat alasannya ingin mempermudah negosiasi antar pemimpin kepala negara dalam pengadaan minyak. Satya Widya Yudha menyatakan:

“Kami pahami itu sangat logis kalau kita ingin *benefit*-nya. Kita berharap ada negosiasi dengan *national oil company* (NOC) meski itu masih *question* karena tidak dijamin dapat harga murah. *Benefit* yang pasti itu seperti apa? Apakah minta diskon dalam pembicaraan antar presiden atau antar menteri? Tapi ini bisa diterima publik”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas penulis melihat bahwa terdapat kepentingan nasional yaitu mendapatkan pasokan minyak dari negara-negara pengekspor. Walaupun melihat kondisi negara sebagai pengimpor justru dinilai sebagai keputusan yang rasional yang perlu diambil Indonesia. Melihat bahwa keputusan internasional adalah hasil dari kesatuan atau *unitary actor* yang terdiri dari pemimpin, menteri hingga birokrat. Aktor-aktor yang terlibat diatas sudah merepresentasikan adanya *unitary actor* suatu negara dalam membuat kebijakan. Sehingga pernyataan-pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai alasan Indonesia bergabung. Berdasarkan pernyataan aktor-aktor pembuat kebijakan diatas dapat dipahami bahwa tujuan dalam OPEC tersebut dapat membantu untuk meningkatkan

ketahanan energi, khususnya pada pasokan minyak yang kini Indonesia dapat dari impor minyak yang tinggi dibandingkan dengan produksi.

Benefit dalam kerjasama dari keanggotaan tersebut juga tidak melulu mengenai *benefit* materiil, namun juga dapat lihat ada tujuan untuk memperoleh *gains*. *Gains* yang dimaksud disini adalah sesuatu yang didapat dari keanggotaan OPEC. *Gains* juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong kepentingan nasional. Berdasarkan pernyataan diatas adalah mendapatkan nilai tawar bagi Indonesia. Nilai tawar yang dimaksud disini adalah untuk meningkatkan nilai Indonesia di mata internasional, sehingga dapat menarik investasi atau kerjasama internasional. Salah satu permasalahan Indonesia dalam penurunan produksi dikarenakan minimnya investor di sektor migas, sehingga kekurangan dalam teknologi untuk meningkatkan pengolahan, dan menemukan sumber-sumber baru. *Benefit* lain ada untuk melakukan diplomasi ekonomi. Kondisi negara mengalami penurunan produksi juga memiliki dampak dalam bidang ekonomi. Sehingga saat bergabung diharapkan juga memperoleh keuntungan ekonomi. Diplomasi sendiri dapat diartikan sebagai tujuan negara dalam perdagangan untuk meningkatkan devisa melalui ekspor, ataupun impor dengan menambah investasi yang masuk.

Melihat program pemerintah dalam bidang migas tentunya membutuhkan investor-investor yang besar dalam memulai menemukan sumber-sumber baru yang nantinya akan menjadi cadangan pasokan minyak dari dalam negeri. Selain itu pernyataan dari Satya Widya mengatakan agar Indonesia mendapatkan akses data, sehingga dapat berguna untuk menganalisa kebijakan yang akan diputuskan. Hal ini memang menjadi salah satu fungsi organisasi internasional. bagi negara bergabung dalam organisasi internasional adalah untuk legitimasi, informasi yang strategis, dan merupakan pilihan kebijakan antara unilateral dan *ad hoc* multilateralisme yang lebih fleksibel dan terkontrol (Thompson, 2006).

